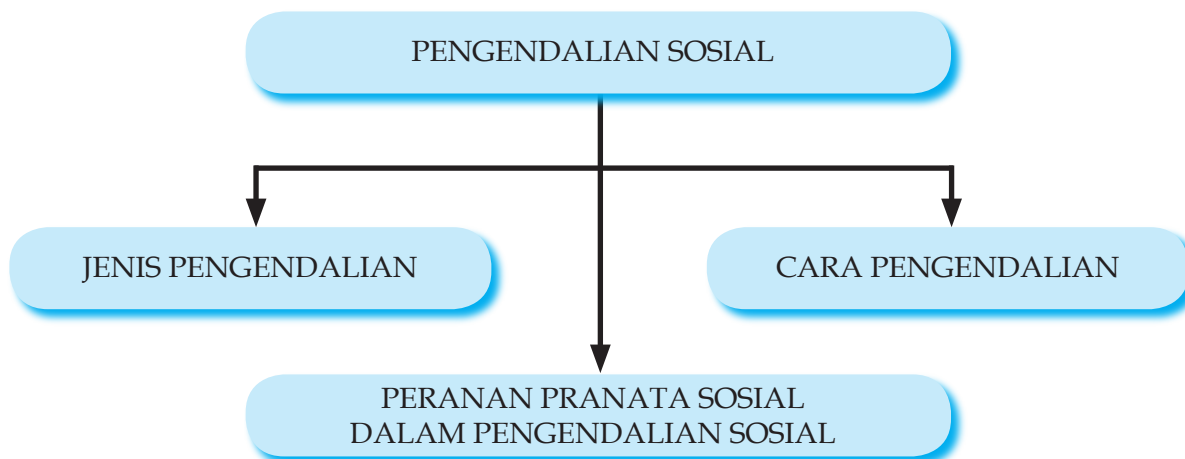


BAB XII

PENGENDALIAN PENYIMPANGAN SOSIAL

Setelah membaca bab ini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian pengendalian penyimpangan sosial dan mendeskripsikan berbagai jenis-jenis pengendalian sosial, cara-cara pengendalian, dan peran pranata sosial dalam upaya pengendalian sosial

PETAKONSEP



Kata Kunci Pengendalian sosial, jenis pengendalian, cara-cara pengendalian, pranata sosial pengendalian sosial

Apa nasihat orangtuamu hari ini atau kemarin? Pernahkah kalian melanggar nasihat orangtua? Biasanya orangtua meminta kita untuk bertindak hati-hati, bersikap rendah hati, selalu menaati peraturan-peraturan yang ada. Tapi kita juga tahu bahwa di mana pun kita berada di situ selalu ada aturan atau norma.

Ketika kalian berada di rumah perilaku kalian harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di rumah, misalnya, harus disiplin, keluar rumah harus pamit, membersihkan kamar tidur, hormat pada orangtua, belajar, dan seterusnya. Di sekolah kalian juga harus mematuhi aturan-aturan sekolah, seperti: mengikuti upacara, memakai seragam, masuk dan pulang tepat waktu, tidak boleh membolos, mengerjakan tugas-tugas, membayar SPP, mempunyai buku, mengikuti pelajaran dengan tertib, mengikuti ulangan, dan sebagainya.

Aturan-aturan yang berlaku di masyarakat disebut dengan norma-norma sosial. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari ketaatan terhadap norma-norma sosial adalah agar kehidupan sehari-hari masyarakat bisa berjalan dengan tertib.

Sayangnya tidak semua anggota masyarakat selalu mematuhi norma-norma sosial yang berlaku di masyarakatnya. Selalu saja ada sebagian anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial, dengan berbagai motif atau alasan. Untuk itu perlu ada upaya pengendalian sosial terhadap perilaku-perilaku menyimpang.



Gambar 12.1. Sebelah kiri adalah poster para pendukung salah satu tim kesebelasan sepak bola Jakarta, sedangkan sebelah kanan poster lawan. Aturan pembuatan poster tidak ditegakkan. Hal semacam ini dapat memancing kerusuhan atau tawuran antar pendukung (Sumber: www.ligaindonesia.com)

A. PENGENDALIAN SOSIAL

Pengendalian sosial merupakan tindakan ‘pengawasan’ terhadap kegiatan atau perilaku anggota-anggota masyarakat (kelompok) agar tidak menyimpang dari norma dan nilai sosial yang berlaku. Pengendalian sosial (social control) telah ada sejak manusia hidup berkelompok.

Pengendalian sosial kerap berkaitan erat dengan norma dan nilai sosial. Bagi anggota masyarakat, norma sosial mengandung harapan dan dijadikan sebagai pedoman bertindak. Namun, masih saja terjadi penyimpangan dari norma-norma yang berlaku. Maka, agar masyarakat berlaku sesuai dengan pedoman itu, pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma-norma yang telah melembaga.

Pengendalian sosial (social control) adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai yang berlaku.

Pengendalian sosial berproses pada tiga pola, yaitu pengendalian sosial kelompok terhadap kelompok, kelompok terhadap anggota-anggotanya, dan pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya.



Gambar 12.2. Berkumpul bersama-sama anak-anak merupakan tindakan yang cukup efektif untuk menanamkan nilai dan norma sejak dini (Sumber : www.letskids.com).

1. Pengendalian kelompok terhadap kelompok

Terjadi apabila suatu kelompok mengawasi perilaku kelompok lain. Misalnya polisi sebagai satu kesatuan mengawasi perilaku masyarakat agar tercipta keamanan dan ketertiban.

2. Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya

Terjadi apabila suatu kelompok menentukan perilaku para anggotanya. Misalnya kelompok guru mendidik dan membina siswanya, atau Korpri (Korps Pegawai Negeri) mengendalikan semua anggota pegawai negeri.

3. Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya

Terjadi apabila individu mengadakan pengawasan terhadap individu lainnya. Misalnya ibu mendidik anaknya untuk mematuhi aturan dalam keluarga.



Gambar 12.3. Tiga pola pengendalian sosial, dari kiri ke kanan, pengendalian kelompok kepada kelompok, kelompok pada anggotanya, dan pribadi terhadap pribadi lainnya (Sumber : www.i3.photobucket.com)

Ada tiga proses sosial utama yang perlu mendapat pengendalian sosial, yaitu:

1. Ketegangan sosial antara adat istiadat dengan kepentingan individu
2. Ketegangan sosial yang terjadi karena benturan kepentingan antar golongan khusus
3. Ketegangan sosial yang terjadi karena ada orang atau kelompok penyimpang yang sengaja menentang tata kelakuan.

Pengendalian ini bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

B. JENIS-JENIS PENGENDALIAN SOSIAL

Pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial. Untuk itu ada beberapa jenis pengendalian. Penjenisan ini dibuat menurut sudut pandang dari mana seseorang melihat pengawasan tersebut.

1. Pengendalian Preventif, Represif, dan Gabungan

Menurut sifat dan tujuannya, ada tiga jenis pengendalian, yakni pengendalian preventif, represif, dan gabungan antara keduanya (preventif-represif).

a. Pengendalian preventif

Merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum



Gambar 12.4. Pengendalian preventif yang dilakukan melalui pendidikan dalam keluarga dan masyarakat (Sumber : www.khrisnabank.com)

terjadi penyimpangan. Untuk menghindari kemungkinan agar tidak sampai terjadi tindakan menyimpang, perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin. Usaha-usaha pengendalian preventif dapat dilakukan melalui pendidikan dalam keluarga dan masyarakat (informal) dan pendidikan di sekolah (formal). Contoh-contoh pengendalian yang bersifat preventif ialah menanamkan sopan santun, tata krama, ketertiban dan disiplin melalui bimbingan, pengarahan, dan ajakan.

b. Pengendalian represif

Berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula perlu diadakan pemulihan. Pengendalian yang diadakan setelah terjadi pelanggaran disebut pengendalian represif. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial. Misalnya kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah dikenai sanksi agar ketertiban sekolah terjaga dan si pelanggar tidak mengulangi perbuatannya.



Gambar 12.5. Siswa SMA yang terlibat dalam sebuah tawuran dikumpulkan di salah satu ruang untuk mendengarkan pengarahan dari kepala sekolah (Sumber : www.ateimage.wordpress.com dan sma1jember.info)

c. Pengendalian sosial gabungan

Merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif). Usaha pengendalian dengan memadukan ciri preventif dan represif ini dimaksudkan agar suatu perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma dan, walaupun terjadi, penyimpangan itu tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain yang dilibatkan. Usaha ini dapat dilakukan lebih dari satu kali, yaitu tindakan pencegahan

sebelum seseorang melakukan penyimpangan dan selanjutnya tindakan pengendalian setelah orang itu melakukan penyimpangan. Jadi, usaha pengendalian pertama dan kedua saling terkait (terpadu). Misalnya, untuk mengawasi agar siswa tidak bolos pada jam pelajaran, sekolah memberlakukan piket (preventif). Walaupun sudah dicegah, ternyata masih ada siswa yang bolos. Untuk mengembalikan ketertiban (tidak bolos) akibat perbuatan tersebut, dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku (represif).

2. Pengendalian Resmi dan Tidak Resmi

a. Pengendalian resmi (formal)

Ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama. Badan resmi kenegaraan mengawasi sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara, seperti undang-undang dasar negara, ketetapan-ketetapan resmi negara, keputusan-keputusan resmi negara, pelaksanaan hukum pidana dan hukum perdata. Cara-cara pengendalian (pengawasan) diatur dengan peraturan-peraturan resmi. Lembaga-lembaga yang bertugas untuk ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengurus keagamaan.



Gambar 12.6. Seorang polisi lalu lintas sedang menjalankan tugas mengatur lalu lintas sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial (Sumber : www.soe-geng.wordpress.com)

b. Pengendalian tidak resmi (informal)

Dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan-peraturan tidak resmi milik masyarakat. Dikatakan tidak resmi karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas, tidak ditemukan dalam hukum tertulis, tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat. Petugas-petugas pengawasan pun tidak diangkat secara resmi, tetapi hanya disepakati oleh satuan-satuan budaya yang ada di masyarakat. Meski demikian, tidak berarti bahwa keefektifan pengawasan menjadi berkurang karena pengawasan tidak resmi menjadi lebih halus dan spontan, namun pengaruhnya seringkali lebih tajam dan hasilnya lebih besar (efektif). Contohnya seperti yang dilakukan oleh asrama, keluarga, RT, paguyuban, agama, dan sebagainya. Pemimpin kelompok cukup efektif dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan menghindari masuknya pola-pola kelakuan yang kurang sesuai dengan pola kehidupan kelompok.



Gambar 12.7. Komunitas RT-RW dengan semua perangkat dan sarannya lebih efektif untuk mengendalikan perilaku warga (Sumber : www.djaloe.wordpress.com)

3. Pengendalian Institusional dan Pengendalian Berpribadi

a. Pengendalian institusional

Ialah pengaruh suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga (institusi) tertentu. Pola-pola kelakuan dan kaidah-kaidah lembaga itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga tetapi juga anggota masyarakat yang ada di luar lembaga tersebut. Misalnya, di suatu daerah terdapat sebuah lembaga pesantren yang mengelola sejumlah besar santri yang tinggal di dalam pondok itu. Pengaruh pesantren tidak terbatas hanya pada santri, tetapi juga penduduk di luar lingkungan pesantren.

b. Pengendalian berpribadi

Ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu yang sudah dikenal luas. Bahkan silsilah dan riwayat hidupnya, dan teristimewa ajarannya juga dikenal. Dalam pengawasan institusional sulit diketahui dari siapa pengaruh itu datang. Sebaliknya, dalam pengawasan berpribadi mudah diketahui siapa pengontrolnya.

C. CARA PENGENDALIAN SOSIAL

Agar pengendalian sosial dapat berjalan secara efektif, perlu ditempuh cara-cara yang sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Ada dua cara pengendalian sosial yakni pengendalian tanpa kekerasan dan pengendalian dengan kekerasan.

1. Pengendalian tanpa kekerasan (persuasi).

Pengendalian ini biasanya ditujukan kepada masyarakat yang hidup dalam keadaan relatif aman dan tentram. Artinya sebagian nilai dan norma sudah mendarah daging pada diri warga masyarakat. Cara-cara yang bisa ditempuh antara lain kotbah-kotbah keagamaan, ceramah umum, pidato-pidato pada acara resmi, dan sebagainya.



Gambar 12.8. Ceramah agama oleh K.H. Quraisy Shihab, di hadapan Presiden SBY dan para pejabat tinggi negara (Sumber : www.presidentri.go.id)

2. Pengendalian dengan kekerasan (koersi)

Pengendalian ini biasanya ditujukan pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial-budaya. Norma-norma yang telah lama ada dihadapkan pada norma-norma atau "budaya" baru. Pada hal norma yang baru ini belum melekat pada diri masyarakat. Jika norma lama ingin dipertahankan, maka pengendalian sosial berfungsi untuk menolak norma yang baru. Namun jika norma lama harus diganti dengan norma baru, maka pengendalian sosial berfungsi untuk mendorong ditaatinya norma-norma yang baru itu.

Pengendalian dengan kekerasan tentu saja tidak boleh dilakukan semena-mena tanpa batas. Biasanya pengendalian ini menimbulkan reaksi yang menentang dari pihak-pihak yang menetapkan pengendalian. Perlu diingat pula bahwa paksaan yang dilakukan terus menerus tidak akan berhasil dengan baik.

Pengendalian dengan kekerasan dapat dibedakan menjadi dua yakni, kompulsi dan pervasi. Kompulsi bertujuan untuk memaksa masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku. Misalnya hukuman penjara. Sedangkan pervasi adalah penanaman norma-norma secara berulang-ulang supaya hal itu bisa masuk dalam kesadaran seseorang.



Gambar 12.9. Pengendalian kompulsif yang memaksa warga masyarakat patuh pada norma-norma yang berlaku (Sumber : www.soe-geng.wordpress.com)

D. PERANAN PRANATA SOSIAL DALAM PENGENDALIAN

Pada bab sebelumnya kita telah membahas pengertian pranata sosial secara umum, dalam arti semua pranata sosial yang ada di dalam masyarakat. Namun di antara sekian banyak pranata sosial, ada yang secara langsung berperan dalam upaya pengendalian sosial tetapi ada juga yang secara tidak langsung. Dalam bab ini akan kita bicarakan pranata sosial yang secara langsung berperan dalam proses pengendalian sosial. Dikatakan secara langsung karena keberadaan pranata sosial tersebut memiliki fungsi mengatur kehidupan bermasyarakat.

Pengendalian sosial pada dasarnya adalah pengawasan. Pengawasan ini dilakukan secara individual maupun kelompok. Agar dapat dilakukan secara efektif, diperlukan pranata khusus yang mengatur perilaku warga masyarakat. Dalam setiap pranata terdapat aparat atau pihak yang diberi wewenang untuk mengawasi atau mengendalikan orang-orang yang berperilaku menyimpang. Beberapa pranata sosial yang ada dalam masyarakat kita adalah:

1. Kepolisian

Polisi itu aparat resmi pemerintah. Tugasnya antara lain memelihara ketertiban masyarakat. Polisi berwenang untuk menangkap dan menahan setiap anggota masyarakat yang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan atau meresahkan masyarakat. Misalnya pencuri, perampok, pemerkosa, pembunuh, perusuh, dan sebagainya.

2. Pengadilan

Ini juga aparat pemerintah. Unsur-unsur yang termasuk aparat pengadilan antara lain, hakim, jaksa, panitera, polisi, dan pengacara. Pihak pengadilan bertugas mengadili orang yang dituduh atau dicurigai melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Jaksa bertugas menuntut plaku agar dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim bertugas menetapkan dan menjatuhkan putusan berdasarkan data yang terungkap di pengadilan. Pengacara atau pembela bertugas mendampingi pelaku untuk memberikan pembelaan.

3. Tokoh Adat

Adat berkaitan dengan kebiasaan yang bersifat magis religius tentang nilai-nilai budaya masyarakat tertentu. Tokoh adat berperan mengendalikan sikap dan perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan norma-norma adat. Bentuk pengendalian bisa berupa penjatuhan sanksi yakni denda, teguran, atau pengucilan dari lingkungan adat.



Gambar 12.10 Pengadilan dan tokoh adat sebagai pranata sosial dalam pengendalian. Gambar sebelah kanan adalah tokoh kharismatis pemimpin kesatuan adat Banten Kidul atau kelompok masyarakat Pancer Pangawinan, Abah Encup Sucipta atau yang biasa disebut Abah Anom (Sumber : www.images.iyankusmayadi.multiply.com)

4. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah seseorang yang memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengamalan yang luas tentang agamanya. Misalnya ulama, ustad, pastor, pendeta, kyai, biksu dan sebagainya.

5. Tokoh Masyarakat

Setiap orang yang dianggap berpengaruh dalam kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat sering disebut tokoh masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang terpandang atau terkemuka dalam masyarakat. Misalnya para pejabat atau penguasa, cendekiawan, tetua adat, dan sebagainya. Pada zaman dulu, guru adalah tokoh masyarakat. Namun seiring dengan perubahan zaman, saat ini guru tidak lagi dianggap sebagai tokoh masyarakat. Seseorang dipandang sebagai "tokoh" , biasanya karena yang bersangkutan memiliki kelebihan tertentu dan dapat dijadikan panutan atau contoh di lingkungan masyarakatnya. Karena seorang tokoh dipandang mampu mempengaruhi orang lain, maka

yang bersangkutan dapat mengendalikan masyarakatnya, misalnya dengan menggalang kerja sama atau gotong royong di antara warga masyarakat.

Rangkuman

Norma-norma sosial mengatur dan mengendalikan perilaku individu dan hubungan antarindividu agar tidak saling merugikan atau menyimpang dari nilai dan norma tersebut. Karena itu, setiap anggota masyarakat haruslah mematuhi norma-norma sosial tersebut. Namun tidak semua anggota masyarakat selalu mematuhi norma-norma sosial yang berlaku di masyarakatnya. Ada sebagian anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Untuk mencegah kecenderungan masyarakat melakukan penyimpangan sosial dibutuhkan pengendalian sosial. Menurut sifat dan tujuannya, ada tiga jenis pengendalian, yakni pengendalian preventif, represif, dan gabungan antara keduanya (preventif-represif). Ada dua cara pengendalian sosial yakni pengendalian tanpa kekerasan dan pengendalian dengan kekerasan. diperlukan pranata khusus yang mengatur perilaku warga masyarakat. Dalam setiap pranata terdapat aparat atau pihak yang diberi wewenang untuk mengawasi atau mengendalikan orang-orang yang berperilaku menyimpang

Latihan

A. Lengkapi pernyataan di bawah ini dengan mengisi titik-titik yang ada, sehingga menjadi pernyataan yang benar.

1. Pengendalian sosial pada dasarnya merupakan tindakan terhadap perilaku atau kegiatan masyarakat.
2. Siswa yang melanggar peraturan sekolah dikenaisanksi. Ini adalah bentuk pengendalian
3. Pengendalian koersi biasanya ditujukan kepada masyarakat yang sedang mengalami
4. Salah satu pranata sosial yang berwenang melakukan pengendalian sosial adalah
5. Seorang ibu yang memberi nasihat kepada anaknya merupakan bentuk pengendalian

B. Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar, dengan cara melingkari huruf di depan alternatif jawaban yang tersedia.

1. Berikut ini adalah pengertian pengendalian sosial secara mendasar, kecuali :
 - A. Mengarahkan
 - B. Mendidik
 - C. Membimbing
 - D. Menuduh
2. Upaya menanamkan kesantunan, disiplin, dan ketertiban bagi anak usia dini merupakan pengendalian sosial yang bersifat :
 - A. Represif
 - B. Preventif
 - C. Edukatif
 - D. Komunikatif

3. Pengendalian yang bersifat formal dapat dilakukan oleh :
 - A. Tokoh adat
 - B. Polisi
 - C. Tokoh masyarakat
 - D. Tokoh pemuda
4. Pengendalian sosial dengan cara kekerasan dapat dilakukan misalnya dalam tindakan:
 - A. Membawa seseorang ke pengadilan
 - B. Memukul
 - C. Denda uang
 - D. Memenjarakan
5. Pengendalian dengan kekerasan dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan perbuatan :
 - A. Kurang komunikatif
 - B. Kurang sopan
 - C. Membuat onar
 - D. Tidak ramah

C. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan ringkas tetapi jelas.

1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri mengapa perlu dilakukan engendalian sosial?
2. Bandingkan pengendalian yang bersifat kompulsif dan pervasif.
3. Kapanakah pengendalian tanpa kekerasan dan dengan kekerasan dilakukan? Jelaskan dengan contoh konkrit peristiwa di sekitarmu
4. Sebut dan jelaskan tiga proses sosial yang berhubungan denga pengendalian sosial.

Refleksi

Guntinglah berita-berita di koran-koran yang berisi tentang penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi. Mengapa terjadi penyimpangan sosial? Bagaimana tanggapanmu terhadap pranata-pranata sosial yang ada dalam melaksanakan tugasnya sebagai pranata pengendalian sosial? Apakah mereka sudah menjalankan fungsinya dengan benar dan berhasil?